



STRATEGI PENGUATAN KEUANGAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI GLOBAL 2023 MELALUI GREEN ECONOMY

Yobel Rayfinando Tua Hutagaol
Politeknik Keuangan Negara STAN

Ronaldo Putra Pratama Sinurat
Politeknik Keuangan Negara STAN

Sulthan Muhammad Shalahuddin
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi : ronaldosinurat7@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama :
[02 12 2022]

Dinyatakan Diterima :
[19 12 2022]

KATA KUNCI:
Ekonomi hijau, Insentif pajak, Resesi global

KLASIFIKASI JEL:
E620

Abstract

Early warning of the emergence of a global recession is a concern for all countries in the world. This issue was reinforced when many world financial institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) joined the buzz about this issue. This issue began when many countries in the world raised interest rates aggressively to reduce inflation. The Bank of the United States (THE FED) has continued its policy of increasing interest rates in recent months and is predicted to reach 3-4% which is the highest interest rate in America in the last 15 years. The Bank of England also raised interest rates by 2.25% which became the highest interest rate in the last 14 years. Finally, the European Union set its highest interest rate in the last 11 years, namely 1.25%. Although many economists say that Indonesia is far from a recession, it does not mean that the global recession will not have an impact on Indonesia. Strengthening the economy will be important in minimizing this threat. The methodology used is a qualitative method of literature study with sources from state finance libraries and journals that support the required information. The results of the discussion show that to deal with the threat of a global recession by applying

ABSTRAK

strategies of green economy and tax meaning ready through a healthy and strong economy.

Peringatan dini akan munculnya resesi global menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia. Isu ini diperkuat ketika banyak institusi finansial dunia seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) ikut mendukung isu ini. Isu ini bermula ketika banyak negara di dunia menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan tingkat inflasi. Bank Amerika Serikat (THE FED) terus melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan terakhir dan diprediksi akan mencapai 3-4% yang merupakan suku bunga tertinggi di Amerika dalam 15 tahun terakhir. Bank Sentral Inggris juga ikut menaikkan suku bunga sebesar 2,25% yang menjadi suku bunga tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Terakhir Uni Eropa menetapkan suku bunga tertingginya dalam 11 tahun terakhir yaitu 1,25%. Meskipun banyak ekonom yang mengatakan Indonesia jauh dari kata resesi, bukan berarti resesi global tidak akan memberi dampak kepada Indonesia. Penguatan ekonomi akan menjadi penting dalam meminimalisir ancaman ini. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif studi kepustakaan dengan sumber dari pustaka keuangan negara serta jurnal yang menunjang informasi yang diperlukan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa untuk menghadapi ancaman resesi global dengan menerapkan strategi pada keuangan negara yaitu dengan penerapan ekonomi hijau. Keputusan untuk menerapkan strategi harus dapat segera dilaksanakan karena resesi global diprediksi akan terjadi dalam hitungan bulan sehingga dalam menghadapi ancaman ini Indonesia harus siap melalui ekonomi yang sehat dan kuat.

1. PENDAHULUAN

Volatilitas ekonomi global pada kuartal keempat tahun 2022 ini cukup tinggi. Lonjakan signifikan harga pada sektor pangan dan energi pun mulai terasa di dunia. Ini disebabkan oleh penurunan tingkat stok penyediaan bahan pangan dan energi global. Krisis pada pangan dan energi membuat negara-negara global waspada akan tekanan inflasi dan juga resesi. Volatilitas ini juga menyebabkan ekonomi negara-negara dunia saling bergejolak satu sama lain. Terjadinya gejolak pasar global seperti pasar modal, pasar valuta asing (valas) serta pasar uang membuat perekonomian dunia menjadi terombang-ambing. Terombang-ambingnya ekonomi global merupakan awal dari krisis ekonomi global.

Dewasa ini, dunia sedang dibayang-bayangi oleh fenomena-fenomena besar yang berpotensi dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Untuk fenomena yang pertama adalah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (The Fed). Kenaikkan suku bunga ini mengakibatkan sulitnya perputaran uang terjadi. Hal ini juga menyebabkan biaya untuk pinjaman meningkat, pengurangan insentif investasi, pelemahan manufaktur serta pada akhirnya menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi lambat. Fenomena ketiga yang dihadapi dunia adalah isu ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina. Invasi militer Rusia ini menyebabkan tensi global meningkat secara signifikan karena terdapat pro dan kontra antar negara di dunia. Peningkatan tensi global ini menyebabkan perekonomian dunia terguncang. Terguncangnya perekonomian dunia ini ditandai oleh naiknya harga energi seperti minyak mentah dan harga pangan secara global. Fenomena ketiga yang dihadapi dunia adalah Scarring Effect akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 kemarin cukup memberikan dampak negatif pada perekonomian dunia, contoh untuk negara Indonesia di tahun 2020 pasar pekerjaan formal menurun di bawah 40%. Penurunan pasar pekerja ini mengakibatkan meningkatnya angka PHK yang merupakan wujud nyata dari scarring effect.

Pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan mengesampingkan faktor meningkat atau menurunnya jumlah pertumbuhan penduduk (Zulkarnain, 2017). International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 adalah 3,2%. Proyeksi ini jelas lebih rendah daripada Januari lalu, IMF memproyeksikan ekonomi global sebesar 4,1%. Proyeksi ini juga jauh lebih rendah daripada tahun 2021 yaitu sebesar 5,7%. Pada 2023 mendatang, IMF secara mengejutkan mempublikasikan kabar buruk bagi perekonomian dunia. IMF secara mengejutkan memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 2,9% pada 2023 mendatang. Dengan proyeksi IMF ini, akan banyak negara kesusahan dalam mendapat dana belanja negara dan kesusahan dalam

mengelola pembiayaan. Akhirnya, banyak negara-negara akan menemui inflasi dan berakhir dengan resesi ekonomi yang suram. Resesi tahun 2023 akan dipicu oleh beberapa hal yaitu, penguatan dolar AS, konflik Rusia-Ukraina, Perubahan Iklim, Inflasi dan juga melemahnya kargo (krisis kargo).

Indonesia sebagai bagian dari negara dunia sewajarnya sudah harus bersiap diri dalam menghadapi ancaman resesi 2023 mendatang. IMF berspekulasi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun 2023 mendatang masih akan dihantui oleh deselerasi global. Progress ekonomi Indonesia tumbuh sangat impresif pada kuartal II tahun 2022 yang berada di angka 5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diestimasi mencapai 5,1% secara tahunan. Namun, adanya volatilitas dan gejolak ekonomi global mengakibatkan tahun 2023 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebagai negara berkembang Indonesia diprediksi mengalami inflasi sebesar 9,5% dan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9%. Dengan adanya momentum seperti ini, Indonesia harus mulai berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ekonomi guna memperkecil dampak dari resesi global 2023.

Sejalan dengan isu dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 maka pemerintah perlu melakukan pencegahan ancaman resesi. Pencegahan resesi perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak, bahkan menghindari dampak resesi yang cukup ekstrim bagi masyarakat. Dampak seperti melonjaknya harga komoditas, meningkatnya tingkat PHK, bahkan sampai krisis energi. Inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan resesi. Diperlukan instrumen yang handal untuk menangkal ancaman ekonomi ini.

Konsep yang dapat ditawarkan untuk mengatasi dan mencegah resesi 2023 adalah green economy. Green economy merupakan prinsip untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Dunia saat ini menghadapi masalah serius berupa krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, peningkatan emisi gas rumah kaca, kesenjangan pendapatan, ketidakseimbangan fiskal kronis dan terorisme (World Economic Forum, 2012). Sebagian besar negara maju menghadapi ketidakseimbangan fiskal yang kronis, sementara negara berkembang rentan terhadap masalah serius lainnya. Memenuhi permintaan dunia akan pangan, energi, dan infrastruktur yang terus meningkat dengan cara "seperti biasa" akan membuat dukungan ekologis dunia tidak dapat dicapai. Akibatnya, harga komoditas dan energi berfluktuasi, polusi tidak terkendali, kesehatan manusia terganggu, dan sistem keanekaragaman hayati hilang. Efek dari daya dukung alam yang terbatas dan pelaksanaan pembangunan bisnis seperti biasa telah mendorong kita untuk memikirkan konsep kebijakan pertumbuhan yang menggabungkan pertumbuhan

ekonomi dengan sumber daya alam yang terbatas dan upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep yang relevan adalah pertumbuhan hijau. Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (OECD, 2011a), efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih, meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta tahan bencana (World Bank, 2012a). Selain itu, pertumbuhan hijau menekankan pada kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif secara sosial (UNESCAP, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan ekonomi hijau dalam rangka menghadapi ancaman resesi global 2023

2. KAJIAN PUSTAKA

Resesi merupakan keadaan dimana perekonomian obsolete. Resesi ini biasanya ditandai dengan PDB sebuah negara menjadi negatif dan mulai muncul pengangguran. World Bank melalui publikasinya yang berjudul "Is a Global Recession Imminent" memproyeksikan bahwa tahun 2023 mendatang akan terjadi resesi global. Proyeksi ini semakin nyata dengan adanya indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi (Bisnis Indonesia, 1 Oktober 2022). Indikasi lainnya adalah banyak produsen-produsen mulai mengurangi jumlah produksinya akibat melemahnya permintaan pasar. Para penanam modal juga lebih memilih mengoper modalnya dalam mata uang dolar. Fenomena ultra-dollar memberi sinyal yang sangat kuat bahwa ekonomi dunia sedang bergerak menuju resesi (Kontan, 27 September 2022).

Bagaikan guncangan ekonomi yang sangat besar, resesi ini menimbulkan cukup banyak dampak bagi kehidupan perekonomian di dunia. Pertama, Naiknya biaya hidup. Kondisi tersebut muncul dari momentum pemulihan ekonomi (pasca pandemi) yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan permintaan yang sangat signifikan, namun tidak dibarengi dengan pasokan yang memadai akibat terganggunya rantai pasokan global. Sejak awal tahun, masyarakat Indonesia sudah bergelut dengan kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada awal September. Hal ini mendorong tingkat inflasi tahunan Indonesia menjadi sekitar 6% bulan lalu. Kedua, Sempitnya lapangan pekerjaan. Resesi yang besar akan menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerjaan ini. Kontraksi di sektor produsen akan minimnya investasi membuat banyak kantor memilih untuk melakukan PHK di masa resesi. misalnya, perusahaan e-commerce seperti Shopee, JD.ID, LinkAja, TaniHub, dan Zenius memilih mengecilkan jumlah karyawannya. Ketiga, Degradasi pendapatan negara. Resesi global yang tinggi akan mengganggu aktivitas

ekspor yang akhirnya akan membuat pendapatan negara melemah terutama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rambu-rambu yang dapat kita lihat dari terganggunya aktivitas ekspor adalah neraca perdagangan menjadi defisit. Keempat, turunnya nilai tukar rupiah. dalam resesi investor akan cenderung menarik modalnya dari obligasi maupun saham. Hal inilah yang menjadi cikal bakal turunnya nilai tukar rupiah.

Indonesia pernah mengalami resesi cukup besar dalam sejarah perekonomian yaitu pada 1998 yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Melonjaknya harga, turunnya nilai rupiah, tingginya tingkat PHK membuat awan kelam di masa itu. Sebagai strategi penyelamatan dari krisis 1998, paket subsidi likuiditas Bank Indonesia diterapkan untuk 16 bank. 670 miliar untuk reformasi hukum kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pemerintah berlutut untuk menandatangani perjanjian dengan IMF untuk paket bantuan (pinjaman) multilateral senilai \$43 miliar sebagai bagian dari memorandum kebijakan ekonomi dan moneter. Kondisi krisis ekonomi 1998 sangat buruk bagi kepemimpinan dan birokrasi yang korupsi. Rupiah telah terdepresiasi 254% tahun-ke-tahun terhadap dolar AS. Rp3.030 (Sep 1997), Rp10.725 (Sep 1998), yang berada di atas level Rp16.000 inflasi 78,2% (Agustus 1998).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmastuti dkk. membahas mengenai kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi yang diakibatkan Covid-19. Terdapat kesamaan dalam penyebab resesi saat pandemi dan pada tahun 2023 yaitu scaring effect. Diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengamanan sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Soemartini yang menyatakan usaha pemerintah dalam menghadapi resesi dengan memprioritaskan bidang kesehatan jaminan sosial dan mengatur kebijakan moneter. Selain itu perlunya restrukturisasi pembiayaan untuk UMKM.

Dari kedua literatur maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah resesi terjadi lebih parah perlu dukungan kebijakan fiskal dan moneter pada sektor-sektor prioritas agar menghidupkan kembali ekonomi yang mengalami perlambatan. Langkah yang diambil pemerintah sudah terlaksana dengan baik untuk memulihkan ekonomi. Akan tetapi, masalah resesi pada tahun 2023 akan lebih kompleks daripada saat pandemi Covid-19.

Kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi resesi akibat pandemi Covid-19 berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengamanan sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis (Darmastuti et al, 2021)

Usaha pemerintah dalam menghadapi resesi dengan memprioritaskan bidang kesehatan jaminan sosial dan mengatur kebijakan moneter serta restrukturisasi pembiayaan untuk UMKM (Soemartini, 2020).

Inflasi terjadi akibat terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar. Untuk dapat mengurangi dampak inflasi maka bank sentral dapat mengambil kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan menyesuaikan dengan besaran inflasi. Peningkatan inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat (Mankiw, 2016)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah jenis penelitian mengkaji data tentang permasalahan yang berkaitan dengan ancaman resesi global tahun 2023 mendatang. Oleh karena itulah, mengidentifikasi permasalahan terkait topik yang sedang dikaji dengan menemukan sumber masalah sesuai dengan fokus-fokus permasalahan yang sedang dikaji. Tahapan mengumpulkan data dan materi terkait fokus permasalahan guna mendukung ketajaman analisis permasalahan yang ada. Penelitian ini mengarahkan penulis untuk merancang dan mengembangkan sebuah solusi dari permasalahan berkaitan dengan penguatan fiskal Indonesia. Metode penulisan yang diterapkan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penyelesaian masalah resesi global dapat dilakukan dengan ekonomi hijau

4. PEMBAHASAN

Pemicu kemungkinan resesi global tahun 2023 adalah: Pertama, pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memang sudah mulai mereda, dan banyak negara yang sudah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa. Namun, pada periode antara wabah Covid-19 di awal tahun 2020 hingga awal 2022, aktivitas ekonomi global turun tajam. Masing-masing negara lebih fokus merespons Covid-19 dan memberlakukan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global juga

mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara yang melindungi pangan dari wabah Covid-19 yang berkepanjangan yang telah menaikkan harga pangan karena pasokan yang tidak mencukupi. Indonesia juga mengalami resesi di penghujung tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu tahun 2023 mendatang diprediksi masih banyak negara yang belum sembuh total dari dampak covid-19.

Kedua, perang Rusia-Ukraina. Ekonomi global belum pulih karena pandemi Covid-19, dan perang Rusia-Ukraina pecah. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai Februari 2022 lalu telah merugikan PDB dunia sebesar \$2,8 triliun (Bisnis Indonesia, 2008). Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasokan global, memicu krisis, terutama di sektor pangan dan energi, yang pada gilirannya mempercepat inflasi. Perang Rusia-Ukraina adalah faktor utama dibalik perkiraan resesi global pada 2023.

Ketiga, tingkat inflasi yang tinggi. Dalam Pembaruan Outlook Ekonomi Dunia Juli 2022, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi estimasi inflasi global karena harga pangan dan energi serta ketidakseimbangan pasokan-permintaan. Inflasi diperkirakan mencapai 6,6% tahun ini di negara maju dan 9,5% di negara berkembang. Angka estimasi inflasi terbaru tersebut naik masing-masing sebesar 0,9 dan 0,8 poin (dalam persen) dibandingkan dengan estimasi sebelumnya pada bulan April 2022 (Bisnis Indonesia, 28 September 2022). Tekanan inflasi global beriringan dengan tingginya harga beberapa komoditas pangan dan energi (minyak mentah, gas alam, dan batu bara) akibat gangguan rantai pasokan akibat perang Rusia-Ukraina. Merespon akan hal ini, negara-negara dunia sudah menarik stimulus fiskaal dan moneter dengan tujuan mitigasi dampak inflasi.

Keempat, kenaikan suku bunga. Selama tahun 2022, Bank of England menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin. Pada saat yang sama, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis poin. Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% (Kompas, 28 September 2022). Kenaikan suku bunga acuan secara simultan oleh bank sentral di seluruh dunia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan resesi global.

Potensi ancaman dari resesi tahun 2023 mendatang haruslah disikapi dengan bijak. Langkah antisipatif haruslah diambil agar kinerja perekonomian tetap terjaga. Walaupun perekonomian bangsa Indonesia sedang tumbuh positif, kita tidak boleh lengah akan resesi. Apabila realisasi resesi global benar muncul maka ekonomi bangsa ini juga akan terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Dalam tulisan ini, akan ditawarkan serta dibahas langkah-langkah kebijakan solutif untuk menangkal dampak ekstrim dari resesi global 2023.

Stabilitas perekonomian Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Akibat dari ketergantungan pada impor energi dan pangan

ketika harga energi dan pangan naik tinggi mengakibatkan adanya tambahan beban pada APBN dan mengurangi daya beli masyarakat. Untuk mengimbangi inflasi negara maju menaikkan suku bunga acuan. Arus modal berpindah dari negara berkembang menuju negara maju yang lebih aman. Pembangunan Indonesia diproyeksikan terhambat. Oleh karena itu, bank sentral ikut menaikkan suku bunga acuan agar inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga dan diharapkan asing kembali berinvestasi ke dalam negeri.

Untuk merespon ancaman Resesi 2023 maka penangkal yang dapat kami tawarkan adalah Green Economy. Green Economy atau ekonomi hijau diartikan sebagai ekonomi yang ramah lingkungan bagi masyarakat. Konsep ekonomi ini menitikberatkan pada

Perkembangan Jumlah UMKM (juta unit)



minimnya penggunaan carbon, Penghematan sumber daya dan pembangunan inklusif secara regional. Investasi hijau ini perlu diaktifkan dan didukung melalui belanja publik yang ditargetkan, reformasi kebijakan, dan reformasi pajak dan peraturan. Jalur pembangunan yang dianjurkan oleh United Nation Environment melihat modal alam sebagai aset ekonomi penting dan sumber barang publik, terutama bagi masyarakat miskin yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, melainkan fokus baru pada ekonomi, investasi, modal dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan, serta hasil sosial dan lingkungan yang positif di kawasan Asia-Pasifik. Secara kebijakan, untuk mendukung terwujudnya Green Economy maka dapat dilakukan beberapa hal yaitu Digitalisasi UMKM, Ketahanan Pangan, Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan juga Transisi Energi Berkelanjutan.

Dominasi tinggi pelaku usaha di Indonesia dipegang oleh sektor UMKM. Dengan jumlah pelaku yang cukup mendominasi menjadikan UMKM ini sebagai penunjang perekonomian di Indonesia. Kinerja yang cukup baik dari UMKM ini terlihat pada masa krisismelanda Indonesia, dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Widyastuti, Nuswantoro, & Sidhi, 2016). Digitalisasi UMKM adalah adanya praktik atau pemanfaatan hasil market intelligence untuk pengembangan produk yang dapat berdampak pada pertumbuhan UMKM di bidang

teknologi (Wijoyo, 2020). Ada dua konsep yang dapat dilakukan dalam digitalisasi UMKM ini sebagai penunjang terwujudnya Green Economy, yaitu Fintech berlandaskan Payment Gateway dan Digital Marketing.

Fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model suatu bisnis konvensional ke bisnis modern (Lestari et al., 2020). Dengan konsep fintech ini akan ada fundamental keamanan bagi pelaku usaha untuk melakukan pembayaran transaksi karena fintech akan terus melakukan improvisasi dalam segi teknologi. Salah satu basis dari konsep ini adalah payment gateway. Payment gateway merupakan alat pembayaran online yang berfungsi untuk mendiskripsikan dan mengesahkan informasi dalam melakukan suatu transaksi yang sudah diatur oleh para provider (Kurniawan et al., 2018). Dengan konsep ini diharapkan sektor UMKM dapat lebih mudah untuk melakukan transaksi dan tentu konsep ini merupakan konsep yang cukup ramah lingkungan.

Digital Marketing merupakan suatu kegiatan promosi baik itu untuk sebuah produk ataupun jasa dengan menggunakan media digital (Rohmah, 2019). Dalam penjualan produksi hasil UMKM diperlukan pemasaran yang tepat dan efisien. Oleh karena itu, digital marketing hadir untuk memberikan hasil yang maksimal untuk promosi secara dua arah. Beberapa option yang dapat menjadi wadah dalam digital marketing antara lain, SEM (Search Engine Marketing),

sumber : kemenkop dan UKM

media sosial (Instagram, LinkedIn, dsb), dan periklanan online (Facebook adsense, Google adsense dan Youtube adsense), SEO (Search Engine Optimization). Pemasaran berbasis digital marketing membuat produsen lebih mudah dalam mengestimasi Return Of Investment (ROI). Dengan kemampuan tersebut, para pelaku bisnis dapat menyebarkan konten brand produknya ke wilayah yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar bahkan sampai seluruh dunia (Rohmah, 2019).

Penerapan kebijakan digitalisasi UMKM ini diharapkan membuat para pelaku usaha akan menjadi lebih beradaptasi dalam pasar persaingan atau bahkan menjadi pelaku primer dalam ekonomi digital. Kebijakan ini juga kami harapkan menjadikan sektor UMKM di Indonesia bertransformasi menjadi Indonesia 4.0. Dan pada tingkat yang lebih lagi, di tengah pasar persaingan bebas ini, UMKM Indonesia dapat memperluas jangkauan pasar regional

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak dan selalu diusahakan untuk ditingkatkan setiap tahunnya (Putri, 2017). Selain untuk pembiayaan APBN, pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulerend) yaitu dengan mengatur kebijakan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (DJP, 2022). Oleh karena itu, dalam menjaga kestabilan ekonomi kementerian keuangan dapat menerapkan sebuah kebijakan fiskal terhadap pajak.

POSTUR RAPBN TAHUN 2023 (triliun rupiah)				
Uraian	2022			2023
	APBN	Perpres 98/2022	Outlook	
A. PENDAPATAN NEGARA	1.846,1	2.266,2	2.436,9	2.443,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.845,6	2.265,6	2.435,9	2.443,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.510,0	1.784,0	1.924,9	2.016,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	335,6	481,6	510,9	426,3
II. PENERIMAAN HIBAH	0,6	0,6	1,0	0,4
B. BELANJA NEGARA	2.714,2	3.106,4	3.169,1	3.041,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.944,5	2.301,6	2.370,0	2.230,0
1. Belanja K/L	945,8	945,8	1.032,5	993,2
2. Belanja Non K/L	998,8	1.355,9	1.337,5	1.236,9
II. TRANSFER KE DAERAH	769,6	804,8	799,1	811,7
C. KESERIMBANGAN PRIMER	(462,2)	(434,4)	(328,4)	(156,8)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(868,0)	(840,2)	(732,2)	(598,2)
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(4,85)	(4,50)	(3,92)	(2,85)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	868,0	840,2	732,2	598,2

sumber : kementerian keuangan

Pada tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19. Insentif yang diberikan tentu harus tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas yang memiliki lapangan pekerjaan luas dan dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Sektor bisnis tersebut diharapkan dapat tetap berjalan, menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, dan menjaga pendapatan rumah tangga (Darono, 2021).

Bercermin pada program PEN tahun-tahun sebelumnya kebijakan pemberian insentif pajak dapat mencegah peningkatan pengangguran yang cukup besar dan meningkatnya insentif investasi di dalam negeri. Pada tahun 2022 dialokasikan dana insentif pajak sebesar Rp 19,53 T sebagai penguatan pemulihan ekonomi. Alokasi total sebesar Rp 178,32 T dibagi menjadi 4 program yaitu program K/L mendukung pemulihan, dukungan UMKM dan Korporasi, program TKDD mendukung pemulihan, dan insentif perpajakan (Kemenkeu, 2022).

Munculnya ramalan resesi tahun 2023 karena disebabkan beberapa faktor seperti tingginya inflasi, kenaikan suku bunga, dan konflik Rusia-Ukraina. Guncangan ekonomi yang mendadak dapat memicu terjadinya resesi karena kurangnya persiapan di berbagai negara. Beban bunga utang meningkat bagi masyarakat maupun perusahaan akibat dari peningkatan suku bunga yang cukup tinggi. Selain itu, terdepresiasi mata uang negara berkembang terhadap dollar membuat utang luar negeri meningkat dari yang sudah diprediksi.

Agar dapat menjaga kondisi ekonomi tetap stabil pada kondisi inflasi yang tinggi maka insentif pajak dapat diberikan kepada para pekerja pada pajak penghasilan dan diberikan pada UMKM. Pada sisi keringanan pajak penghasilan maka dapat tetap menjaga daya beli masyarakat walaupun harga barang menjadi mahal akibat inflasi. Penghasilan yang siap dibelanjakan atau disposable income pekerja meningkat membuatnya dapat membeli lebih banyak barang atau barang dengan kualitas lebih baik. Perputaran uang dapat tetap terjaga walaupun inflasi menyentuh angka sekitar 6%. Ekonomi

terus dapat berputar dan tingkat produksi tetap meningkat setiap triwulan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III berada pada kisaran 5%.

Pemberian insentif pajak pada UMKM ditunjukkan untuk menjaga tingkat PDB dan tingkat pengangguran. UMKM menjadi penyumbang PDB sangat cukup besar hingga 60% dari total PDB. Selain itu, UMKM menjadi penyerap tenaga kerja hingga 95%. Jika sektor ini terdampak akibat krisis global, pemerintah harus memberi perhatian lebih karena akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Manfaat dari insentif ini membuat biaya dari UMKM berkurang dan keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk menjaga tingkat produksi walaupun biaya produksi menjadi mahal akibat inflasi. Di sisi lain, insentif ini bisa dialihkan UMKM untuk menggaji karyawan agar mencegah terjadinya PHK.

Insentif pajak memberikan pengaruh pada belanja masyarakat, produktivitas UMKM, dan tingkat pengangguran. Akan tetapi selain dari pengaruh tersebut terdapat pengaruh lain terhadap perpindahan modal. Akibat dari suku bunga negara maju yang terus naik, investasi di dalam negeri menjadi lebih tidak menarik. Secara kebijakan moneter BI dapat menaikkan suku bunga tetapi secara kebijakan fiskal Kemenkeu dapat memberikan insentif pajak bagi asing yang ingin menanamkan modalnya. Kebijakan ini dapat membuat kembalinya arus modal ke dalam negeri. Hasil dari investasi asing dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai penunjang berjalannya perekonomian.

Dalam upaya untuk mencapai ketahanan pangan maka diperlukan keterlibatan pemerintah dalam menjaga kondisi pertanian. Indonesia harus mengurangi ketergantungan dalam mengimpor pangan dan lebih mengandalkan sektor pertanian dalam negeri. Untuk itu maka banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah seperti membuka lahan untuk food estate, pengembangan penelitian varietas tanaman unggul, dan pemenuhan pupuk yang terjangkau.

Kebijakan fiskal perpajakan dapat diterapkan agar mendorong sektor pertanian dapat berkembang lebih cepat. Pemberian insentif atau pemotongan pajak dalam rantai pasok kebutuhan bibit, pupuk, atau peralatan pertanian. Selain itu dapat juga diberikan insentif pajak untuk pajak hasil pertanian. Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak minat masyarakat untuk bekerja pada sektor pertanian dan juga hasil pertanian meningkat kualitasnya.

Pemotongan pajak rantai pasok harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan terjadi. Pupuk menjadi fokus utama karena saat ini kebutuhan pupuk lebih tergantung pada impor. Pada kondisi guncangan ekonomi global harga pupuk menjadi lebih tinggi daripada harga normal. Petani menjadi lebih terbebani dengan naiknya harga pupuk impor. Oleh karena itu, bea masuk untuk pupuk diberikan

keringanan agar distributor memiliki biaya yang lebih kecil dan petani mendapatkan pupuk yang lebih terjangkau.

Pajak hasil pertanian juga dapat diberikan insentif pajak sama halnya dengan UMKM. Keuntungan dari pengurangan pajak ini dapat dimanfaatkan kembali oleh para petani untuk meningkatkan kesejahteraan atau membeli pupuk, bibit, dan peralatan. Walaupun tidak langsung menaikkan produksi pangan peningkatan kesejahteraan dan pembelian persediaan dapat meningkatkan produktivitas petani. Hasilnya ketahanan pangan akan menjadi lebih kuat dari guncangan global.

Begitu juga dengan isu kesehatan global. Penguatan arsitektur kesehatan global menjadi perbincangan pada presidensi G20 kemarin. G20 menjadi langkah nyata dan segera dimana dikatakan kesehatan global harus diperkuat hal ini diwujudkan melalui WHO yang lebih kuat dan bertaring serta solidaritas dan keadilan harus menjadi fondasi utama kesehatan global

Perwujudan penguatan arsitektur kesehatan global adalah melalui peningkatan investasi industri kesehatan, kerja sama riset dan transfer teknologi diperkuat, dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang diperluas. Selain itu, TRIPS Waiver juga harus diperluas aksesnya untuk solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik.

Pelaksanaan program ini memiliki 3 fokus, yaitu distribusi kebutuhan kesehatan publik yang dimana isu ketidaksetaraan akses terhadap solusi medis di negara-negara berkembang. Kedua, pembiayaan kesiapsiagaan pandemi yang sudah dikembangkan melalui Financial Intermediary Fund. Dan yang ketiga adalah tata kelola kesehatan global. Terkait ini, kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik dan ditopang oleh prinsip solidaritas dan kesetaraan harus menjadi landasan tata kelola kesehatan global ke depan.

Dan sebagai fokus yang terakhir adalah transisi energi berkelanjutan (*sustainable energy transition*). Fokus ini secara langsung dilaksanakan dalam format Energy Transitions Working Group (ETWG). Program ini memiliki 3 prioritas yaitu akses, teknologi dan pendanaan.

Melalui forum G20, Indonesia merangsang upaya kolektif dunia dalam mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Oleh sebab itu, negara-negara G20 memiliki peranan penting dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan komitmen dalam mempercepat transisi energi. Presiden Joko Widodo juga menyatakan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Pemerintah juga sepakat untuk menerapkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp30 per kg karbon CO₂e. Selain itu, dari sektor lain seperti minyak dan gas bumi juga telah dilakukan perencanaan penerapan karbon yaitu rencana penerapan Carbon Capture, Utilization

and Storage (CCUS) yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan produksi migas, pembatasan routine flaring, optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk rumah tinggal dan transportasi, serta penurunan emisi metana.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Permasalahan yang akan dihadapi terdapat kesamaan dengan yang sudah terjadi akibat Pandemi Covid-19 yaitu terjadinya resesi tetapi terdapat perbedaan yang kontras saat ini yaitu meningkatnya suku bunga. Pemicu terjadinya resesi global tahun 2023 adalah dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa, perang Rusia-Ukraina, tingkat inflasi yang tinggi, dan kenaikan suku bunga. Solusi yang telah diterapkan sejak tahun 2020 memiliki dampak yang positif untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa solusi yang sudah ada diterapkan kembali dengan sedikit penyesuaian.

Terdapat solusi untuk menghadapi ancaman resesi global yaitu penerapan Green Economy. Green Economy menerapkan kebijakan, digitalisasi UMKM, Ketahanan Pangan, Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan juga Transisi Energi Berkelanjutan. Digitalisasi UMKM dan pemberian insentif pajak telah berlangsung. Sedangkan Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dan Transisi Energi Berkelanjutan mulai terdapat perencanaan untuk penggarapan.

Digitalisasi UMKM diterapkan dengan adanya Fintech berlandaskan Payment Gateway dan Digital Marketing. Ketahanan pangan dapat melalui kebijakan fiskal untuk pemberian insentif perpajakan bea masuk pupuk dan pajak hasil pertanian. Peningkatan arsitektur kesehatan global diwujudkan dengan melalui program fokus terhadap distribusi kebutuhan kesehatan publik, pembiayaan kesiapsiagaan pandemi, dan tata kelola kesehatan global. Transisi energi berkelanjutan fokus pada akses, teknologi, pendanaan, penerapan pajak karbon, dan perencanaan penerapan karbon.

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait ancaman resesi 2023 dan konsep Green Economy. Terutama untuk digitalisasi UMKM, pemerintah diharapkan mampu membina serta melakukan penyuluhan tentang efisiensi pelaku usaha UMKM berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Alwi, H. H., & Nirawati, L. (2022). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah (USD/IDR) terhadap Indeks Saham Bisnis-27 di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 620–635. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1242>

- Bachtiar, A. (n.d.). KRISIS EKONOMI DUNIA 2022.
- Charles, H., Godfray, H., & Garnett, T. (2014). Food security and sustainable intensification. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 369(1639).
<https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0273>
- Darmastuti, S., Juned, M., Susanto, F. A., & Al-Husin, R. N. (2021). COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 4(1).
<https://doi.org/10.33753/madani.v4i1.148>
- Dwi, N., Direktorat, K., & Pajak, J. (n.d.). INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA.
- Heliang, I. (2021). Prosiding Seminar Stiami Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. 8(1).
- Nugroho, V., & Ramli, I. (2010). Nugroho dan Ramli: Krisis Ekonomi Krisis Politik Dunia dan IHSG KRISIS EKONOMI KRISIS POLITIK DUNIA DAN IHSG.
- Purnomoratih, Y., Ditjen, K., Provinsi, P., & Selatan, K. (n.d.). EFEKTIVITAS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENOPANG TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN SELATAN.
- Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi: Vol. IV (Issue 2).
- Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 3, Issue 1).
<http://ojs.stiami.ac.id>
- SEMINAR NASIONAL STATISTIKA IX (2020). (n.d.).
<http://prosiding.statistics.unpad.ac.id>